

## Multistakeholder Forum II Tahun 2024

Kamis, 12 September 2024 | 14.00 – 15.30 WIB

### Latar Belakang

Sebagaimana mandat OGP National Handbook, setiap negara anggota OGP perlu untuk melaksanakan Multistakeholder Forum setiap tahunnya dengan jumlah minimal dua kali setahun. Pada kesempatan kali ini, Multistakeholder Forum dilakukan untuk mengumumkan hasil Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII tahun 2024 Semester 3. Harapannya, dengan diumumkannya hasil Monitoring dan Evaluasi tersebut terdapat perbaikan dan akselerasi dari seluruh pemangku kepentingan.

### Pembahasan

**Bapak Bogat Widyatmoko**, Deputy Bidang Politik Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas memberikan sambutan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Open Government telah sesuai dengan Asta Cita Nomor 7 Visi Misi Prabowo Gibran, sehingga menjadi penting untuk kita bersama-sama dapat mendorong pelaksanaan RAN OGI VII.
- Berdasarkan hasil Monev B18, terdapat tiga komitmen yang on track, dan ada empat komitmen yang sampai saat ini belum memiliki progress yang on track. Bagi komitmen-komitmen yang belum memiliki progres yang baik perlu untuk segera dilakukan strategi percepatan agar dapat dikerjakan dan diselesaikan secara baik.
- Terdapat tiga tantangan pelaksanaan RAN OGI VII:
  - o Menurunnya Komitmen pelaksanaan dan rendahnya pelaporan data dukung
  - o Keterbatasan pendanaan OMS yang berdampak
  - o Rendahnya ko-kreasi antara K/L dan OMS
- Agenda kedepan:
  - o Penguatan Dasar hukum: Sekretariat OGI telah melakukan pengajuan Izin Prakarsa kepada Mensesneg terkait Strategi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia. Selain itu untuk jalur lainnya Sekretariat OGI juga telah melakukan Izin Program Penyusunan Rperpres Tahun 2025.
- RAN VIII akan dilakukan transformasi, perbaikan tata kelola, dan strategi baru agar pelaksanaan RAN lebih efektif dan implementatif dilaksanakan pada tahun 2024.
- Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mengusulkan dan mengajukan komitmen-komitmennya dalam RAN OGI VII Tahun 2024.
- Kedepan harapannya RAN OGI bisa menjadi tonggak reformasi politik dan hukum di Indonesia.

### Sesi Diskusi

#### Komitmen 4

- Terdapat perubahan Target yang perlu dilakukan. Terkait dengan kelembagaan ada perubahan dari RPP menjadi Rperpres.
- Mbak Maha: Progressnya bagaimana
- Kominfo sudah menyerahkan ke Menpan terkait dokumen persyaratan kepada menpan mengenai draft kajian yang disampaikan Menkominfo kepada Menpan pada awal bulan

Juli untuk direview Menpan sebelum akan ditindaklanjuti mau lewat Izin Prakarsa atau Progsun.

- Amanat UU: RPP dan Rperpres. RPP sudah di kumham pada akhir agustus untuk diharmonisasikan. Akan dibahas lebih lanjut dala pembahasan harmonisasi.
- Judul RPP Pelaksanaan atas UU PDP
- Untuk lembaga akan ada di Perpres

## **Komitmen 2**

Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas memberikan tanggapan terkait dengan perkembangan Komitmen 2 sebagai berikut:

- Perpres dan Permenkumham (posisi masih membutuhkan persetujuan Presiden)
- Revisi Perpres masih menjaring masukan dari stakeholders (terkendala pertukaran data BO)
- Feasibility pencapaian B24? Permenkumham bisa difinalisasi sebelum pergantian Kabinet, Perpres perlu dilihat kembali ke rekan Kemenkumham

Tindak Lanjut:

- Perlu review untuk melihat feasibility pencapaian B24
- Akan di follow up oleh rekan Kumlasi ke AHU, Kumham

## **Komitmen 3**

Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas memberikan tanggapan terkait dengan perkembangan Komitmen 3 sebagai berikut:

- Terdapat kendala PIC appointment dari Komnas HAM
- Sedang dicari kembali biro yang bekerja sama dengan Auriga
- Komnas HAM tidak merasa memiliki tanggungjawab terhadap komitmen tersebut

Theo dari Sekretariat Open Government Indonesia memberikan tanggapan sebagai berikut :

- CSO pemrakarsa komitmen melakukan kajian terkait kondisi tren kasus. Identifikasi kajian tersebut akan disampaikan ke Komnas HAM dan ke Polri
- B24 Polri hanya menerima dan menyusun instrumen perlindungan Hukum (mengejar penyusunan Perkap untuk RAN OGI VIII)
- B24 Komnas HAM untuk seharusnya aktif mensupervisi/ monitoring hasil rekomendasi kajian dan data yang dilakukan oleh OMS (seharusnya ikut serta dalam kajian bersama OMS)

## **Komitmen 7**

Ibu Rahma selaku Direktur Eksekutif Suarise memberikan tanggapan sebagai berikut:

- B24 → Mereka tidak ada budget. Kominfo dari KIP hanya akan ikut matrik sosialisasi tapi anggarannya mengalami Relokasi terkait dengan anggaran.

Ibu Yunes, selaku koordinator dari Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas memberikan tanggapan sebagai berikut

- Akan dikoordinasikan di unit kerja Bappenas, utamanya di kertas kerja.
- Tindak lanjut: koordinasi dengan sekretariat OGI untuk pelaksanaan sosialisasi dengan metode yang *cost-efficient*

### **Komitmen 8**

Ibu Sandra, dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa memberikan tanggapan terkait perkembangan Komitmen 8 sebagai berikut:

- Komitmen 8 Akuntabilitas sosial keterbukaan anggaran Desa
- setiap tahun selalu dilakukan pengembangan dan sudah ada aplikasi hasil kerja sama dengan BPKP . Dalam aspek apa yang dimaksudkan dengan keterbukaan anggaran Desa?
- Ditjen Bina Pemdes: Kemendagri tidak terinfo terkait komitmen ini.
- Ada kendala dari TI sebagai lead komitmen

Biro Perencanaan Kemendagri memberikan tanggapan tambahan sebagai berikut:

- Dua kriteria keberhasilan, review bersama hasil pendampingan dan kriteria penguatan fasilitasi teknis bagi pendamping desa → kewenangan dari kemendes (TI bisa mengajak rekan Kemendes)
- Kemendagri tidak dapat melakukan review karena kendala dari kemandekan dari rekan TI
- Bagaimana peran kemendagri selanjutnya?
- Aparat pemerintah desa pembinaan ada di Kemendagri, sementara pendampingan ke masyarakat ada di Kemendes
- Kesulitan proses koordinasi dengan setnas OGI

Tindak lanjut:

- akan diskusi dengan TI untuk melihat kendala komitmen yang terjadi,
- perlu untuk melibatkan Kemendes untuk membagi porsi Kemendes dengan Kemendagri.
- Secara paralel dapat memasukkan data dukung ke sistem monev
- Untuk koordinasi ke sistem monev akan dilakukan dengan setnas OGI dengan Rocan Kemendagri

### **Komitmen 5**

Bapak Anwar, selaku perwakilan dari KOPEL meemberikan tanggapan terkait perkembangan komitmen 5 sebagai berikut:

- Komunikasi berjalan baik dan dokumen seharusnya sudah disiapkan oleh Bawaslu
- Perlu ditindaklanjuti kembali dengan Bawaslu untuk melihat kendala pelaporan

Tindak lanjut:

- Mendorong pelaporan data dari Bawaslu

### **Komitmen 11**

Yoris, selaku perwakilan dari IJRS:

- Monitoring dan Evaluasi terkait dengan aksesibilitas peradilan akan ditindaklanjuti oleh IJRS dan dilakukan pertemuan dengan Mahkamah Agung (MA).

### **Komitmen 12**

Amanda, Biro Perencanaan, Mahkamah Agung:

- MA tidak melaporkan target capaian terkait "pelaksanaan diskusi antara MA dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum"

- Sudah ada diskusi terkait portal informasi bantuan hukum. MA setiap satker sudah memiliki portal informasi (website pengadilan). Portal informasi masukan dari OMS perlu lebih user friendly. Meski demikian belum ada informasi terkait pengembangan sistem informasi di tiap portal informasi sehingga belum bisa melakukan pelaporan lebih lanjut

Yoris selaku perwakilan dari IJRS memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Sedang ada diskusi dengan MA, sudah ada kebijakan baru bahwa portal akan diintegrasikan dengan aplikasi Sitbankum BPHN, namun masih akan dikoordinasikan lebih lanjut
- Portal terpadu untuk bantuan hukum (selama ini data masih terpisah pisah di masing-masing kamar) sehingga banyak data yang double dan kesulitan untuk membentuk kebijakan bantuan hukum → Satu data bantuan hukum.
- Progress: Dari diskusi terdahulu, terakhir baru peradilan agama yang menyetujui integrasi data. Kamar Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) dan yang lainnya belum.

Tindak Lanjut:

- Diskusi intensif terkait progress integrasi data

#### **Komitmen 14**

Bapak Bona, selaku perwakilan dari INFID

- semakin menurunnya jumlah pelaporan dan ko-kreasi, periode transisi kepemimpinan berdampak pada kerja renaksi OGI.
- Bagaimana mempersiapkan B24 dan laporan penutup? Dengan banyaknya yang sudah diselesaikan di B18, maka akan semakin sedikit yang dilaporkan di B24
- Apakah dilanjutkan, dengan catatan tidak ada kokreasi dengan KPPA, atau dihentikan di B18?
- Sementara, di sisi lain masih banyak yang belum diselesaikan di UU TPKS dan penyelesaian aturan turunan diharapkan terus dilanjutkan
- RAN OGI 2025-2026 apakah prosesnya akan ada kekosongan sementara, atau akan langsung dilanjutkan? Apakah ke depan OGI akan tetap menjadi flagship?

Direktorat Hukum dan Regulasi memberikan tanggapan perkembangan komitmen 14 sebagai berikut:

- Review Progress harmonisasi dana korban sebagai turunan UU TPKS, apakah mungkin selesai?
- Sudah ada draf, baru tahap PAK. Belum ada kelanjutan lagi namun tidak dapat dipastikan apakah akan diselesaikan per Desember 2024.
- Akan ada FGD khusus untuk pembahasan progress PP DBK sebagai turunan UU LPKS, akan diundang OGI dan juga INFID

Radit dari Kementerian Luar Negeri memberikan tanggapan terkait dengan pelaksanaan komitmen anti SLAPP:

- Isu perlindungan terhadap pembela lingkungan (Anti SLAPP) saat ini menjadi perhatian dunia internasional. Pemerintah Indonesia juga terus didorong untuk bisa dapat berbagian dan mengeluarkan kebijakan yang mendukung hal tersebut.
- Kementerian Luar Negeri juga akan berupaya mendorong isu ini melalui Dit. HAMKA

**Penutup:**

Laporan Monitoring dan Evaluasi B18 tetap membuka pengumpulan data bagi Kementerian/Lembaga yang belum menugmpulkan Data Dukung sampai 14 hari kedepan.